



PERAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

Sony Hendra Permana*

Abstrak

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam mencapai ketahanan pangan, terutama melalui pengembangan varietas unggul sebagai kunci peningkatan produktivitas dan daya saing. Sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) hadir untuk melindungi inovasi pemuliaan tanaman dengan memberikan hak eksklusif kepada pemulia dalam memproduksi, menjual, dan menyebarluaskan varietas baru. Namun, pelaksanaannya sistem ini menghadapi tantangan, terutama minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan konsultan PVT yang berperan mendampingi proses pendaftaran varietas. Artikel ini membahas kelembagaan sistem PVT di Indonesia, manfaat perlindungan varietas bagi pemulia, petani, dan konsumen, serta peran vital konsultan PVT dalam memperkuat ekosistem inovasi pertanian. Pelantikan 24 konsultan PVT baru pada tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk mempercepat perlindungan varietas unggul, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan ketahanan pangan. Komisi IV DPR RI dapat memberikan penguatan regulasi melalui revisi UU tentang penguatan varietas tanaman, upaya pengawasan dengan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, dan dukungan anggaran dengan memberikan alokasi anggaran yang seimbang.

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan sektor strategis untuk mencapai ketahanan pangan. Inovasi dalam bidang pertanian, khususnya pengembangan varietas unggul, menjadi kunci utama mencapai peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian. Inovasi tersebut akan berkelanjutan jika dilindungi secara hukum, oleh karena itu sistem perlindungan varietas tanaman (PVT) menjadi krusial untuk memberikan pengakuan kepada pemulia tanaman atas varietas baru yang diciptakan, memberikan hak eksklusif memproduksi, menjual, dan menyebarluaskan benih varietas dalam kurun waktu tertentu, sekaligus akan menjaga keanekaragaman hayati ("Kementan Minta Konsultan PVT", 2025).

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya hayati yang beragam, sayangnya jumlah varietas yang mendapatkan hak PVT masih terbatas. Hal ini tercermin dari jumlah permohonan hak PVT yang hanya 50 pemohon (2020), 61 pemohon (2021), 78 pemohon (2022), 69 pemohon (2023), dan 82 pemohon (2024). Sedikitnya jumlah pemohon dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pemohon terhadap tata cara dan persyaratan, biaya pengujian yang besar, kurang tersosialisasikannya manfaat perlindungan varietas tanaman

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sony.hendra@dpr.go.id

(PPVTPP, 2025). Konsultan PVT memiliki peran strategis dalam menjembatani pemohon dengan sistem PVT sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pada September 2025, Kementerian Pertanian telah melantik 24 konsultan PVT baru yang merupakan pelantikan pertama dalam 20 tahun sejak UU PVT berlaku (“Fakta menarik: Kementan lantik 24 konsultan”, 2025). Langkah ini adalah terobosan untuk memperkuat sistem PVT di Indonesia. Tulisan ini membahas pentingnya peran konsultan PVT terhadap pengembangan pertanian berbasis inovasi.

Kelembagaan dan Manfaat Pelaksanaan PVT di Indonesia

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi dan sektor pertanian yang signifikan, Indonesia memiliki struktur kelembagaan yang kompleks dalam mengelola sistem PVT. Sistem PVT di Indonesia melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran yang berbeda. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem PVT di Indonesia. Lembaga ini berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan memiliki tugas pokok melaksanakan pengembangan sistem perlindungan varietas tanaman, penilaian dan pendaftaran varietas, penerbitan sertifikat perlindungan, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pemulia (PPVTPP, 2024).

Sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan 2024, jumlah varietas tanaman yang telah terdaftar dan dilindungi di Indonesia sebanyak 1.584 varietas baik varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan. Selanjutnya terdapat 1.063 varietas untuk varietas yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Pelepasan Varietas Tanaman. Namun, pada periode tersebut terdapat kecenderungan terjadinya penurunan jumlah varietas yang terdaftar (PPVTPP, 2024).

Jumlah tersebut sesungguhnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan sistem PVT adalah kompleksitas prosedur pendaftaran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di PPVTPP. Proses penilaian teknis yang memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit menjadi kendala bagi para pemulia, terutama yang berasal dari kalangan akademisi dan peneliti dengan anggaran terbatas (Fauzi, 2023).

Lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan sistem PVT di Indonesia adalah Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman (BPSB) yang tersebar di berbagai daerah. BPSB memiliki peran dalam hal sertifikasi, pengawasan peredaran benih, penyusunan perencanaan, pembinaan, penilaian, serta uji adaptasi/observasi varietas tanaman pangan dan hortikultura. Kerja sama antara PPVTPP dan BPSB menjadi sangat krusial untuk memastikan efektivitas sistem PVT di Indonesia. Di tingkat internasional, Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum kerja sama terkait perlindungan varietas tanaman, seperti melalui keterlibatan di East Asia Plant Variety Protection Forum (EAPVP) dan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam pertukaran informasi dan pengembangan sistem PVT.

PVT memainkan peran penting dalam melindungi inovasi di bidang pertanian dan pemuliaan tanaman. Dengan memberikan perlindungan dan hak eksklusif kepada pemulia tanaman, akan memberikan penghargaan atas usaha mereka, mendorong penelitian lebih lanjut, dan meningkatkan keamanan pangan serta keragaman genetik. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemulia tanaman tetapi juga oleh petani dan konsumen, yang dapat menikmati varietas tanaman yang lebih baik dan lebih berkualitas. Adapun manfaat yang akan dirasakan dari PVT adalah sebagai berikut (“Memahami Perlindungan Varietas”, 2024):

1. Melindungi hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif yang diberikan memungkinkan pemulia untuk mencegah pihak lain dari penggunaan atau perbanyakan varietas mereka tanpa izin, menjaga keunikan dan nilai dari varietas tersebut.
2. Meningkatkan nilai ekonomi. Pemulia tanaman dapat memonetisasi varietas baru mereka melalui lisensi atau penjualan.
3. Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan. Pelindungan ini menciptakan insentif bagi pemulia tanaman untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan.
4. Menjamin kualitas dan konsistensi. Karena pemulia tanaman memiliki hak eksklusif, mereka dapat mengontrol standar produksi dan distribusi varietas, memastikan bahwa varietas yang ada di pasar memenuhi kualitas yang diharapkan.
5. Mendukung keragaman genetik dan keamanan pangan. Dengan pengembangan varietas baru yang memiliki sifat unggul, seperti ketahanan terhadap penyakit atau perubahan iklim, pelindungan ini membantu meningkatkan keamanan pangan secara keseluruhan.

Peran Konsultan PVT dalam Sistem Perlindungan Varietas Tanaman

Konsultan PVT memiliki peran yang sangat vital dalam ekosistem perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, konsultan PVT adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan pengujian, penilaian, dan pemeriksaan atas varietas tanaman yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan. Konsultan PVT memiliki peran krusial dalam pengelolaan hak, membantu pemohon memahami syarat, menyusun dokumen, menghubungkan dengan pemerintah, sehingga perlindungan varietas lebih efisien, transparan, terpercaya, dan memperkuat daya saing perbenihan nasional (“Kementan Minta Konsultan PVT”, 2025). Keberadaan konsultan PVT sangat penting mengingat kompleksitas prosedur dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam sistem PVT. Selain itu, PVT juga menjadi etalase pendampingan berkompentensi tinggi sekaligus mitra strategis pemerintah dan pemohon, serta bagian penting ekosistem perlindungan varietas yang kredibel di tingkat global (“Kementan Minta Konsultan PVT”, 2025).

Selama ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem PVT di Indonesia adalah minimnya jumlah konsultan yang kompeten. Selama 20 tahun terakhir, tidak ada rekrutmen konsultan PVT baru, sehingga menyebabkan kekosongan dan ketidakseimbangan distribusi konsultan di berbagai daerah. Kondisi ini diperkirakan memberikan dampak pada lambatnya proses pendaftaran dan perlindungan varietas tanaman, yang pada gilirannya mengurangi minat para pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas baru. Dengan dilantiknya 24

konsultan PVT diharapkan dapat memperkuat sistem PVT dan mempercepat proses pendaftaran varietas unggul hasil penelitian di dalam negeri (“Fakta menarik: Kementan Lantik 24 Konsultan”, 2025).

Penambahan konsultan PVT ini diharapkan tidak hanya menjadi mesin penggerak teknis dalam menjembatani pemulia dengan sistem PVT, tetapi juga memperkuat elemen pendukung dalam sistem PVT di Indonesia. Kedepannya diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan berkelanjutan bagi konsultan, serta pemerataan akses layanan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat menjamin bahwa sistem PVT benar-benar mampu mendorong kreativitas pemulia, meningkatkan kualitas benih, dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Penutup

Perlindungan varietas tanaman merupakan fondasi penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberadaan sistem PVT yang efektif bukan hanya memberikan penghargaan terhadap karya pemulia, tetapi juga mendorong investasi riset, menjaga keragaman genetik, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Konsultan PVT memegang peran sentral dalam memastikan proses perlindungan varietas berjalan lebih cepat, transparan, dan kredibel. Dengan langkah strategis pemerintah melantik konsultan PVT baru, diharapkan sistem perlindungan varietas di Indonesia semakin optimal, mampu mendukung inovasi lokal, serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan.

Komisi IV DPR RI berperan penting dalam memperkuat sistem PVT melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Komisi IV dapat memperkuat regulasi atau penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terkait PVT melalui penguatan UU terkait PVT. Pengawasan implementasi kebijakan PVT juga harus dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Dalam hal fungsi anggaran maka perlu dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas dan distribusi konsultan PVT di seluruh Indonesia.

Referensi

- Fakta menarik: Kementan lantik 24 konsultan PVT baru, perkuat perlindungan varietas tanaman RI setelah 20 tahun. (2025, September 14). *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/amp/uang/fakta-menarik-kementan-lantik-24-konsultan-pvt-baru-perkuat-perlindungan-varietas-tanaman-ri-setelah-20-tahun-467703-mvk.html>
- Fauzi, F. (2023). Perlindungan hukum bagi pemulia dan varietas tanaman dalam kerangka hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2). hlm: 95-116.
- Kementan minta konsultan PVT perkuat perlindungan varietas tanaman RI. (2025, September 14). *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5107813/kementan-minta-konsultan-pvt-perkuat-perlindungan-varietas-tanaman-ri>
- Memahami perlindungan varietas tanaman: definisi, tujuan, dan manfaat utamanya. (2024, September 2). *BMG Consulting Group*. <https://konsultanperizinan.co.id/memahami-perlindungan-varietas-tanaman-definisi-tujuan-dan-manfaat-utamanya/>
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian [PPVTPP]. (2024, Juli 12). Mengenal lebih dekat sistem perlindungan varietas tanaman. <https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/publikasi/kegiatan/qktul-1720781043/mengenal-lebih-dekat-sistem-perlindungan-varietas-tanaman>
- Pusat PVTTPP Kementan dorong pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman sebagai asset masa depan. (2024, Juli 25). *SINPO.id*. <https://sinpo.id/detail/77226/pusat-pvtp-kementan-dorong-pendaftaran-dan-pelepasan-varietas-tanaman-sebagai-aset-masa-depan>
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian [PPVTPP]. (2025). Laporan Tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2024.

